



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 07 Februari 2018

Halaman: 2

## Anggota Dewan Biasa Potong Kompas

**Pengurus LPMK Keluarkan Uneg-Uneg**

**JOGJA** - Kebiasaan anggota DPRD untuk titip program kegiatan di wilayah dikeluhkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Jogja. Tanpa mengikuti proses pembahasan sejak awal, anggota DPRD menitipkan program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) saat pembahasan sudah sampai di kecamatan.

"Saat Musrenbang sudah sampai di kecamatan baru ngomong titip program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)," keluh Ketua LPMK Kadipaten Kraton Jogja Gardani dalam forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2019 di Balai Kota Jogja, kemarin (6/2). Gardani menceritakan pengalamannya saat Musrenbang tahun lalu. Tapi, kebiasaan potong kompas anggota DPRD

Kota Jogja itu diaukinya sudah terjadi sejak awal dilantik 2014 lalu. Gardani enggan menyebut nama maupun partai asal anggota DPRD Kota Jogja itu.

Dia mengisahkan saat Musrenbang tahun lalu, mulai dari pengumpulan aspirasi di RT/RW untuk kegiatan pra-Musrenbang hingga pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan yang sudah berupa keputusan hasil musyawarah, anggota DPRD Kota Jogja tersebut tidak pernah terlibat.

Tapi tiba-tiba saat pembahasan di kecamatan ada usulan perbaikan RTLH pada rumah orang tertentu. "Padahal sejak dari RT/RW tidak diusulkan, begitu juga untuk pekerjaan konblok, usulannya tahun depan tapi tiba-tiba diajukan tahun ini, sebagai LPMK saya tidak pernah dilibatkan," ungkapnya.

Meskipun sudah berupaya potong kompas, belum tentu semua program usulannya bisa terealisasi. Seperti untuk RTLH, Gardani mengaku tetap melaku-

kan verifikasi ke rumah sasaran dan jika tidak memenuhi persyaratan tidak akan dikerjakan.

"Kalau memang benar-benar layak akan dibantu," ungkapnya.

Gardani pun menyayangkan tindakan anggota DPRD Kota Jogja ini yang dinilai hanya mengakomodasi kelompoknya saja. "Kalau bisa itu ya taat aturan, semua proses sudah dimulai dari bawah kok tiba-tiba nyegat di akhir," keluhnya.

Mendengar keluhan itu, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko yang juga hadir dalam forum tersebut tegas meminta anggotanya untuk menempuh jalur yang benar. Yang dimaksudnya dengan penjarangan aspirasi dari bawah. "Jangan menang-menangan harus sesuai regulasi aturan yang ada," tegasnya.

Koko, sapaannya, mengatakan untuk menghindari praktik potong kompas, usulan para anggota DPRD diakomodasi dalam pokok pikiran (pokir). Pokir

tersebut akan disinergikan dengan hasil Musrenbang.

"Harus disesuaikan dengan regulasi, jika tidak sesuai, pasti akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tuturnya.

Tapi, politikus PDIP itu menilai pada tahun ini tidak terjadi lagi aksi anggota DPRD yang titip program. "Karena tidak ada kesempatan lagi, karena tahun ini sibuk dalam ranah politik," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi meminta peran aktif masyarakat dalam kegiatan Musrenbang yang mulai dikerjakan di Kota Jogja. Menurutnya keterlibatan masyarakat penting untuk ikut bersama-sama membangun Kota Jogja. Untuk akhir Musrenbang sendiri ditargetkan pada 22 Maret mendatang.

"Kesempatan masyarakat menyampaikan harapannya untuk pembangunan Kota Jogja," tuturnya. (pra/lla/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Bappeda</u> .....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3. ....	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4. ....		<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005